BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Signifikansi Irak Dalam Kepentingan Amerika Serikat

Dengan berakhirnya Perang Dingin yang mempertemukan AS dengan Uni Soviet, elemen utama dari situasi geopolitik AS mengalami suatu perubahan. Lingkungan geopolitik AS setelah Perang Dingin lebih rumit, penuh dengan ambiguitas dan selalu mengalami perubahan. Sejak Perang Dunia II, prioritas AS di kawasan Timur Tengah telah di fokuskan untuk mengamankan akses AS akan keperluan minyak, dan sejak tahun 1948 AS juga berupaya untuk mendukung eksistensi Israel dan intervensi militer AS pada kawasan ini. Dengan rutuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, maka AS telah menjadi sau-satunya negara *superpower* di kawasan Timur Tengah. Sejak saat itu AS juga berusaha untuk menciptakan ekonomi yang stabil bagi AS dengan cara merendahkan tingkat konflik militer dan politik yang menjadi wabah di kawasan Timur Tengah. (http://www.foreignpolicyinfocus.org, diakses 27 Juni 2009)

Istrabadi menyebutkan setidaknya ada tiga alasan vital kenapa AS harus sukses di Irak, yaitu:

1. Irak bukan hanya barisan terdepan dalam melawan terorisme tetapi Irak juga merupakan barisan terorisme itu sendiri.
2. AS dengan jelas memiliki kepentingan untuk mengurangi pengaruh Iran dikawasan Timur Tengah untuk itu AS memerlukan Irak sebagai bagian upayanya untuk mengurangi pengaruh Iran.

3. AS memiliki kepentingan yang kuat dalam ekonomi khususnya dari minyak. Untuk itulah AS mencoba untuk terus masuk dan menjaga eksistensinya di kawasan ini, khususnya di Irak. (http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/ 9004.html, diakses 27 Juni 2009)

Dari ketiga hal diatas yang diungkapkan oleh Istrabadi, bisa disimpulkan bahwa AS memang sangat peduli terhadap Irak terkait dengan semua kepentingan-kepentingannya. AS menganggap Irak sebagai sebuah negara yang akan membantu eksistensinya di kawasan tersebut, dan hal ini akan mempermudah AS dalam melindungi dan meraih kepentingan-kepentingan nasionalnya.

AS juga menyebutkan ada tiga prinsip mendasar kenapa AS harus sukses di Irak dan kenapa Irak menjadi negara penting bagi AS, dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada akhir masa pemberlakuan strategi WMD, AS menyebutkan:

1. Sukses di Irak merupakan sebuah cerminan dan kritik terhadap keamanan nasional dan sebuah bukti kesuksesan perang melawan teror.
2. Kegagalan di Irak akan berimbas pada kemanan AS, kawasan dan sekutu AS.
3. Tidak ada solusi kedua bagi Irak, semua hal yang berhubungan dengan Irak dan setiap pilihan yang ada melibatkan resiko yang beragam. (*Highlight of the Iraq strategy review, National Security Council, 2007*)

Irak selalu menjadi salah satu negara yang menjadi prioritas utama bagi AS. Hal ini dikarenakan AS memiliki beberapa kepentingan baik terkait secara langsung maupun tidak dengan Irak. Kepentingan utama AS diantaranya adalah kepentingan ideologi, ekonomi dan keamanan

4.1.1 Kepentingan Ideologi

Ideologi adalah satu visi, suatu gambaran verbal tentang masyarakat yang baik dan sarana-sarana utama untuk mencapainya (Leege dan Kellstedt, 2006 : 25). Ideologi mengandung beberapa substansi yaitu:

1. Sistem keyakinan politik
2. gagasan-gagasan politik yang merumuskan orientasi tindakan
3. Berbagai gagasan kelompok yang sedang memerintah
4. Pandangan dunia kelompok sosial tertentu
5. Gagasan-gagasan yang mempropagandakan kesadaran palsu diantara yang tertindas (Heywood dalam Daulay, 2009 : 21).

Kepentingan nasional tentu menjadi hal paling mendasar yang akan dicoba untuk diwujudkan oleh setiap negara, baik itu negara besar maupun negara kecil. AS sebagai sebuah negara besar tentu saja akan selalu mencoba untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui politik luar negeri yang dijalankannya, baik dengan cara diplomasi atau kerjasama bahkan dengan cara-cara militer.

Kepentingan politik AS di kawasan TImur Tengah salah satunya adalah liberalisasi demokrasi politik. Penyebaran nilai-nilai demokrasi memang sudah

lama menjadi fokus para pengambil kebijakan di AS, terlebih lagi ketika perang dingin, dimana sistem internasional saat itu terbagi menjadi dua kubu atau lebih dikenal dengan bipolar (dua kutub). Yaitu Uni Soviet dengan ideologi komunisnya sebagai blok Timur dan AS dengan demokrasinya sebagai blok Barat. Dengan semangat menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia, AS telah mencatat beberapa kesuksesan dalam mempromosikan demokrasi di berbagai belahan dunia, diantaranya adalah Korea Selatan, Taiwan dan negara-negara Amerika Latin. Ditegaskan pula bahwa AS akan terus mempromosikan ide-ide demokrasi ke seluruh dunia, termasuk negara-negara timur tengah (Daulay , 2009 : 78). Doktrin tentang demokratisasi dan menghadirkan kebebasan di Timur Tengah ini pertama kali disampaikan Bush di *West Point* pada tahun 2002 dalam pidatonya Bush mengungkapkan:

> "perang ini akan sulit diramalkan, namun saya yakin akan hal ini, kemana pun kita membawanya, bendera AS akan berkibar gagah bukan hanya demi kesatuan kita, namun demi kebebasan. Perjuangan negara kita selalu lebih besar daripada pertahanan kita. Kita bertempur, seperti yang selama ini kita lakukan, demi sebuah perdamaian yang adil, sebuah perdamaian yang memihak kebebasan manusia. Kita akan membela perdamaian dari ancaman teroris dan tiran, yang kita inginkan bagi orang lain tak berbeda dengan yang kita inginkan bagi diri kita sendiri, aman dari kekerasan, berkah kebebasan dan harapan untuk hidup yang lebih baik" (Huntington, 2005 : 425-426)

Visi untuk membawa demokrasi ke Timur Tengah tetap dipertahankan walaupun Uni Soviet telah runtuh, AS tetap ingin mempertahankan dominasi dan hegemoninya di Timur Tengah. Dengan demokratisasi ini diharapkan akan banyak negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi di Timur

Tengah, karena dengan diterapkannya demokrasi maka AS berharap bahwa negara-negara Timur Tengah khususnya Irak akan lebih mudah untuk diajak kerjasama. Selain itu, demokrasi juga diharapkan dapat membawa dan menciptakan liberalisasi ekonomi di kawasan ini.

Keluarga Bush memiliki sejarah panjang dan keterkaitan dengan Timur Tengah, baik dalam koridor perusahaan ataupun politik dan diplomasi. Jadi, saat kita membicarakan doktrin Bush di kawasan ini, kita harus menarik sebuah benang merah antara kebijakan Bush senior dan Bush junior. Timur Tengah menjadi inti dari doktrin Bush yang mengutamakan respon regional.

Secara keseluruhan, respon terhadap kebijakan Bush ditanggapi kurang positif, namun dalam kenyataannya hal yang cukup mustahil jika harus memaksa Bush untuk mereformasi agendanya, karena Bush percaya bahwa dengan demokratisasi ini AS telah mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini tentu saja tidak dapat mengindikasikan hubungan antara penyebab dan efek terhadap hubungan strategi Bush untuk Timur Tengah dan respon regional terhadap hal tersebut, namun yang mungkin adalah untuk mengargumentasikan keinginan Bush terhadap demokratisasi Timur Tengah bagaimana Bush ingin merubah cara pandang dari semua pelaku, pemimpin serta aktifis dan melaksanakan agendanya di kawasan tersebut.

Respon terhadap perang menjadi sangat defensive, di level politik beberapa negara Arab seperti Algeria, Mesir, Yordania, Maroko, Arab Saudi juga negara-negara tetangga seperti Tunisia dan Yaman telah memillih untuk bekerja sama dengan AS untuk mengatasi aksi-aksi ekstimis muslim di negaranya masing-

masing. Strategi Bush yang dikenal dengan *war on terror* telah berhasil menciptakan sebuah peluang besar bagi AS untuk mendapatkan dan menjadi negara paling berpengaruh di kawasan ini. Perang Irak dan demokratisasi ini bagi beberapa orang dipandang sebagai neo-imperealisme.

4.1.2 Kepentingan Ekonomi

Timur Tengah dikenal dengan wilayah paling kaya akan minyak yang merupakan komoditas paling vital yang dibutuhkan negara-negara industrialis seperti AS, tanpa adanya minyak proses industrialisasi AS akan mengalamai hambatan dan bisa menghancurkan perekonomiannya. Itulah salah satu alasan mengapa AS tetap menjaga hegemoni dan pengaruhnya dikawasan itu agar mendapat jaminan kelancaran suplai minyak.

Keohane dalam bukunya, *After Hegemony* (1984), antara lain mengemukakan bahwa negara yang menguasai sumber daya energi dunia akan menguasai dunia. Motivasi untuk menguasai cadangan minyak Irak tidak secara eksplisit terungkap sebagai salah satu *driving force* yang memicu krisis AS-Irak.

Seperti halnya motif Perang Sipil dan Perang Dunia, pada kali inipun, motif agresi AS terhadap Irak memiliki motif ekonomi. Ada beberapa hal ekonomis yang mendorong agresi AS kali ini. Pertama, penurunan ekonomi AS terus terjadi, sejak peristiwa 11 September, menyusul skandal akuntansi Enron & World.com, pemogokan buruh-buruh kapal di pelabuhan-pelabuhan pesisir Pasifik selama berminggu-minggu, dan terakhir menurunnya kemampuan

ekonomi AS karena munculnya blok-blok dagang baru yang kuat seperti Uni Eropa dan Cina.

Kedua, minyak Irak merupakan minyak dengan kualitas terbaik di dunia namun tidak bisa dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan AS karena Irak lebih memilih untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara selain AS dan memakai Euro sebagai cadangan devisa dari hasil minyaknya. Ketiga, AS mengalami surplus produksi senjata. AS merupakan produsen senjata terbesar di dunia, namun dalam perkembangan terakhir, konsumsi senjata dunia menurun karena banyak negara mulai mengurangi anggaran militernya termasuk untuk pembelian senjata.

Perekonomian kapitalisme AS mengandung resiko besar karena ketergantungan yang tinggi kepada pasar. Di sinilah sumber kontradiksi utama dari kapitalisme. Pasar bebas yang mengandalkan diri pada *free fight liberalism*, menyebabkan setiap orang atau usaha dapat melakukan ekspansi ekonomi, namun kemudian pasar akan memilih yang terbaik, dalam artian yang paling murah dan bermutu bagus. Bagi produsen berarti tingkat efisiensi dan efektifitas produksi harus tinggi sehingga bisa menekan harga namun tetap bermutu. Sehingga setiap produsen berpacu untuk berproduksi, karena semakin massal, maka biaya produksi semakin turun. Sehingga kemudian melahirkan hukum ekonomi "penawaran akan menciptakan permintaan" (*supply side economic*). Secara teori, keadaan ini akan menguntungkan konsumen (pemakai produk) karena bisa memilih yang terbaik. Namun secara praktek, keadaan ini akan melahirkan

kelebihan produksi yang memicu penghentian atau pengurangan produksi karena pasar tidak mampu menampungnya lagi.

Selain faktor tersebut, salah satu faktor penting lainya adalah Irak yang kaya akan minyak. Minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi yang paling strategis. Minyak berada di jantung ekonomi modern. Hampir seluruh infrastruktur ekonomi industri bergantung pada minyak. Di AS, walaupun hanya menyumbang sekitar 5 persen GDP (*Gross National Product*), minyak merupakan sumber energi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 40 persen total kebutuhan energi AS berasal dari minyak, 24 persen dari gas, 23 persen dari batu bara, 8 persen dari energi nuklir, dan 5 persen dari sumber lainnya (http://www.unisosdem.org/ ekopol.php, diakses 28 Juni 2009)

Menurut estimasi Departemen Energi Amerika, pada tahun 2003 Irak mempunyai 113 milyar barrel cadangan minyak terbukti (*proved reserve*). Itu adalah kedua terbesar setelah Arab Saudi dengan 262 milyar barrel. Sebagian besar cadangan ini belum dieksploitasi sebagai akibat perang dengan Iran dan penerapan sanksi ekonomi PBB selama kurun waktu dua dekade terakhir ini. Di samping cadangan terbukti tersebut, diperkirakan pula ada 220 milyar barrel cadangan minyak yang belum terbukti. (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/25/teropong/ 207845.htm, diakses 28 Juni 2009)

Total cadangan ini setara dengan 98 tahun impor minyak AS. Potensi produksi minyak Irak dalam kondisi normal diyakini bisa mencapai 10 juta barrel per hari. Jumlah ini berarti melebihi tingkat produksi Arab Saudi pada saat ini,

yakni sekitar 7 sampai dengan 8 juta barrel per hari. (http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0303/25/teropong/207845.htm, diakses 28 Juni 2009)

Potensi minyak yang terkandung di Irak inilah menjadi motif ekonomi kenapa AS merasa bahwa Irak merupakan salah satu negara penting yang dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi. Saddam yang dirasa akan menghambat upaya AS untuk bisa masuk ke Irak dan memegang kendali terhadap kawasan Timur Tengah membuat AS berkeinginan untuk menghentikan rezim Saddam Husein agar segala hal dan urusan AS di Irak lebih mudah.

4.1.3 Kepentingan Keamanan

Politik dan fenomen hubungan internasional adalah dua buah fenomena yang tidak bisa lepas dari negara dan kepentingannya serta upaya-upaya dalam mencapai kepentingan tersebut. Dalam upaya mencapai kepentingan tersebut tidak jarang hal tersebut berdampak negative terhadap keamanan negara lain yang akan mengganggu keseimbangan kekuatan.

AS mengkategorikan Irak kedalam *rogue states* bersama Iran dan Korea Utara. Dalam strategi keamanan nasional 2002 yang keluar paska adanya serangan 9/11, AS menyatakan bahwa ketiga negara ini yang dicurigai mengembangkan dan memiliki senjata pemusnah massal sebagai *rogue states*, yaitu negara yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memiliki senjata pemusnah massal dan diperkirakan akan dapat mengancam keamanan nasional AS, negara sahabat dan aliansinya. Ketiga negara tersebut juga dijuluki sebagai poros setan atau *axis of evil*.

Kepentingan AS di Timur Tengah adalah berusaha menjaga stabilitas keamanan di kawasan ini. Timur Tengah memang sejak lama rentan terhadap konflik, hingga saat ini masih banyak konflik-konflik yang bermunculan dari kawasan ini. Hal ini tentu saja dapat mengancam kepentingan AS lainnya, untuk itulah AS berusaha menjaga stabilitas keamanan kawasan ini dengan cara mendirikan berbagai pangkalan militer di negara-negara Timur Tengah, diharapkan dengan cara seperti ini AS akan dapat lebih mudah mengontrol kawasan ini, dengan begitu kepentingan AS seperti suplai minyak tidak akan terganggu.

Irak yang dianggap sebagai salah satu negara kunci dikawasan ini menjadikannya salah satu prioritas utama bagi AS, terlebih lagi konfrontasi Iran membuatnya menjadikan Irak menjadi prioritas utama untuk menghambat dan mengurangi pengaruh Iran di kawasan ini.

AS menyebutkan tiga gambaran umum keadaan di Irak dan mengapa Irak menjadi penting bagi AS, yaitu:

1. Sekutu AS di kawasan tersebut sangat peduli terhadap pengaruh negatif Iran di Irak. Dengan mendukung pemerintahan Irak maka hal ini akan membantu untuk menstabilkan kawasan.
2. Iran telah mengancam Irak melalui berbagai macam cara dan bidang serta penyelesaiannya. Ancaman Irak ini termasuk ancaman paling berbahaya dan menyusupkan aktor-aktor Iran ke dalam institusi-institusi Irak.
3. Ancaman Syria bagi Irak meskipun lebih kecil dibandingkan dengan ancaman yang datang dari Iran, hal ini memperburuk keadaan yang harus

dihadapi pemerintahan Irak. (*U.S Security Council. Highlights of the Iraq Strategy Reviews)*

Dari ketiga hal diatas jelas bahwa kepentingan AS di Irak adalah untuk menjaga eksistensi AS di Timur Tengah dan sebagai sebuah upaya untuk mengamankan semua kepentingan AS di Irak khususnya dan di Timur Tengah umumnya. Ketakutan AS akan pengaruh Iran yang akan mempengaruhi Irak dan stabilitas kawasan membuat AS lebih waspada dan cepat bertindak untuk mengatasi segala kemungkinan yang ada dengan segala cara, termasuk melakukan agresi terhadap Irak.

4.2 Kepentingan Amerika Serikat Terhadap Senjata Pemusnah Massal

Senjata pemusnah massal merupakan senjata yang paling ditakuti di dunia karena kemampuannya dalam menciptakan kerusakan dan korban yang begitu besar. Di era modern senjata ini pertama digunakan oleh AS dan melihat dampaknya setelah apa yang terjadi di Perang Dunia II, dimana AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Melihat dampak yang terjadi setelah penggunaan pertama kali senjata pemusnah massal, masyarakat internasional mulai melakukan pembatasan terhadap negara yang akan mengembangkan dan ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap senjata pemusnah massal.

Banyak pernjanjian-perjanjian internasional yang muncul untuk mengatasi penyebaran senjata pemusnah massal. AS sebagai sebuah negara *super power* merasa harus dapat mengatasi tantangan ini agar senjata pemusnah massal tidak

jatuh ke tangan yang tidak mereka kehendaki atau ke tangan mereka yang bisa menimbulkan konflik di dunia internasional.

AS setuju jika senjata pemusnah massal ini hanya dikuasai oleh negara-negara besar dan bukan negara yang mereka anggap sebagai *rouge states* yaitu negara-negara yang dikenal sangat anti AS seperti Iran, Irak dan Korea Utara yang juga diberi nama oleh Bush sebagai *axis of evil* atau poros setan (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/cron.html, diakses 15 Oktober 2008). Hal ini dikarenakan AS percaya bahwa jika senjata pemusnah massal jatuh ke tangan negara-negara dengan rezim yang mereka percaya sangat anti AS maka hal ini akan menjadi ancamana bagi AS khususnya dan bagi dunia internasional umumnya.

Dari tabel berikut kita bisa melihat ada 25 negara yang baik dicurigai maupun yang telah memiliki program senjata pemusnah massal.

Tabel 4.1

Daftar Negara Yang Memiliki Program Senjata Pemusnah Massal

No	Nama Negara	Memiliki Program Senjata Nuklir	Memiliki Program Senjata Biologi	Memiliki Program Senjata Kimia
1	Algeria	Tidak	Mungkin	Dicurigai
2	Cina	Ya	Mungkin	Dicurigai
3	Mesir	Tidak	Mungkin	Dicurigai
4	Prancis	Tidak	Sudah dihentikan	Sudah dihentikan
5	India	Ya	Tidak	Mungkin
6	Indonesia	Tidak	Tidak	Mungkin
7	Iran	Mungkin	Mungkin	Mungkin
8	Irak	Sudah dihentikan	Sudah dihentikan	Sudah dihentikan
9	Israel	Ya	Mungkin	Mungkin
10	Kazakhstan	Sudah dihentikan	Tidak	Mungkin
11	Libya	Sudah dihentikan	Tidak	Sudah dihentikan

12	Myanmar	Tidak	Tidak	Mungkin
13	Korea Utara	Ya	Mungkin	Ya
14	Pakistan	Ya	Tidak	Mungkin
15	Rusia	Ya	Dicurigai	Ya
16	Saudi Arabia	Tidak	Tidak	Dicurigai
17	Serbia	Tidak	Tidak	Tidak
18	Afrika Selatan	Sudah dihentikan	Sudah dihentikan	Dicurigai
19	Korea Selatan	Sudah dihentikan	Tidak	Dicurigai
20	Sudan	Tidak	Tidak	Dicurigai
21	Siria	Tidak	Mungkin	Ya
22	Taiwan	Sudah dihentikan	Tidak	Mungkin
23	Inggris	Ya	Sudah dihentikan	Sudah dihentikan
24	Amerika	Ya	Sudah dihentikan	Ya
25	Vietnam	Tidak	Tidak	Mungkin

Sumber:
http://usiraq.procon.org/viewresource.asp?resourceID=000678#26countries, diakses 28 Juni 2009.

Dari tabel diatas yang dikeluarkan pada akhir tahun 2006, dengan jelas disebutkan bahwa Irak memang memiliki program senjata pemusnah massal namun telah dihentikan terkait dengan *Operation Iraqi Freedom* yang dilancarkan AS pada 19 Maret 2003.

Isu terorisme yang berkembang paska serangan 9/11 terhadap gedung WTC pun menjadi sebuah ancaman baru bagi AS. AS pun mulai mengantisipasi perkembangan senjata pemusnah massal untuk tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang mereka anggap bisa mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

AS yang sudah terbiasa melakukan *arm race* sejak perang dingin berlangsung sangat peduli terhadap kepemilikan senjata oleh negara lain. Kekuatan militer dan kekuatan senjata serta kepemilikan terhadap teknologi senjata menjadi perhatian tersendiri bagi AS yang memang telah menjadi negara terdepan dalam bidang militer dan senjata. AS yang selalu memiliki anggaran militer terbesar di dunia (http://www.voanews.com/indonesian/2009-06-09-

voa3.cfm,diakses 28 Juni 2009) menjadi negara yang terdepan dalam perihal teknologi dan kepemilikan senjata. Untuk itu AS juga merasa harus bertanggung jawab terhadap penyebaran senjata, khususnya senjata-senjata non konvensional dan memiliki daya hancur yang besar karena AS beranggapan jika senjata-senjata ini jatuh ke tangan yang salah maka hal ini sudah dapat dipastikan akan menimbulkan bencana yang besar bagi seluruh umat manusia.

4.3 Upaya-upaya Amerika Serikat Untuk Memerangi Senjata Kimia Di Irak

Kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) yang terdiri dari senjata nuklir, senjata biologi dan kimia oleh negara-negara musuh AS serta teroris adalah tantangan terbesar terhadap keamanan nasional AS. AS menyebutkan bahwa mereka harus menemukan strategi yang komprehensif dalam upaya mengatasi ancaman ini dari segala dimensi. Strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini (termasuk didalamnya adalah pengembangan dan penyebaran WMD) merupakan integral dari Strategi Kemanan Nasional AS. Sama seperti halnya strategi perang terhadap terorisme, strategi untuk keamanan tanah air, dan konsep pencegahan AS dalam memerangi WMD, pendekatan AS untuk memerangi WMD telah mengalami perubahan mendasar dari strategi-strategi sebelumnya.

Untuk berhasil dalam melaksanakan strateginya, AS merasa harus memanfaatkan peluang ini, termasuk penerapan teknologi terbaru, peningkatan dan penekanan pada pengumpulan data dan analisa intelijen, memperkuat hubungan aliansi, dan pembentukan kemitraan baru dengan negara bekas pengembang. Sesuai dengan tiga pilar utama dari *U.S National Strategy to*

Combat Weapon of Mass Destruction, yaitu *counter proliferation, non proliferation* serta WMD *Consequences Management* maka AS memulai dengan upaya *pre-emptive* yang sesuai dengan semangat pilar pertama yaitu *counter proliferation* melalui *Operation Iraqi Freedom* (OIF), yang didukung dengan upaya-upaya diplomasi dan perencanaan yang matang untuk langkah-langkah berikutnya pada saat setelah invasi dilakukan.

4.3.1 *Operation Iraqi Freedom* sebagai bagian dari *Counter Proliferation*

Pre-emptive strike adalah salah satu doktrin dari Bush yang memberi legitimasi untuk menyerang lebih dahulu sebelum diserang musuh, hal ini telah tertuang dalam strategi nasional AS tahun 2002, yang mengizinkan AS menyerang negara manapu yang dianggap berpotensi mengancam kemanan AS tanpa meminta persetujuan PBB. (Daulay, 2009 : 76)

Pada tanggal 19 Maret 2003 atau sekitar pukul 05.34 pagi atau waktu Baghdad tanggal 20 Maret, Amerika Serikat dan Inggris resmi melakukan serangan militer terhadap Irak yang dilakukan untuk menghentikan semua kegiatan upaya pengembangan senjata pemusnah massal termasuk didalamnya senjata kimia dan untuk menghentikan rezim yang sedang berkuasa saat itu yaitu rezim Saddam Husein, serangan ini dilakukan kurang dari dua jam setelah batas waktu yang diberikan kepada Saddam untuk menginggalkan Irak telah habis, Bush menyatakan kepada rakyatnya bahwa hal ini merupakan sebuah upaya militer untuk melumpuhkan Irak dan untuk membebaskan masyarakatnya dan

menyelamatkan dunia dari bahaya. *Operation Iraqi Freedom* (OIF) ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengakhiri rezim Saddam Husein
2. Untuk mengindentifikasi, mengisolasi dan menghilangkan senjata pemusnah massal Irak.
3. Untuk mencari, menangkap dan mengeluarkan teroris dari Irak
4. Untuk mengumpulkan infromasi intelijen jaringan teroris.
5. Untuk mengumpulkan dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan jaringan global senjata pemusnah massal.
6. Untuk mengakhiri sanksi dan mendukung hak asasi manusia di Irak.
7. Untuk mengamankan sumber-sumber minyak dan sumber daya alam lainnya yang merupakan milik dari rakyat Irak.
8. Untuk membantu rakyat Irak untuk menciptakan pemerintahannya sendiri.

Kedelapan tujuan yang ingin dicapai melalui OIF ini telah dapat mencerminkan semua kepentingan dan keinginan yang ingin dicapai oleh AS melalui perang ini. Semuanya berkaitan dengan isu keamanan dan terorisme yang menjadi prioritas utama dari AS paska tragedi 9/11 yang memang telah merubah strategi keamanan nasional AS.

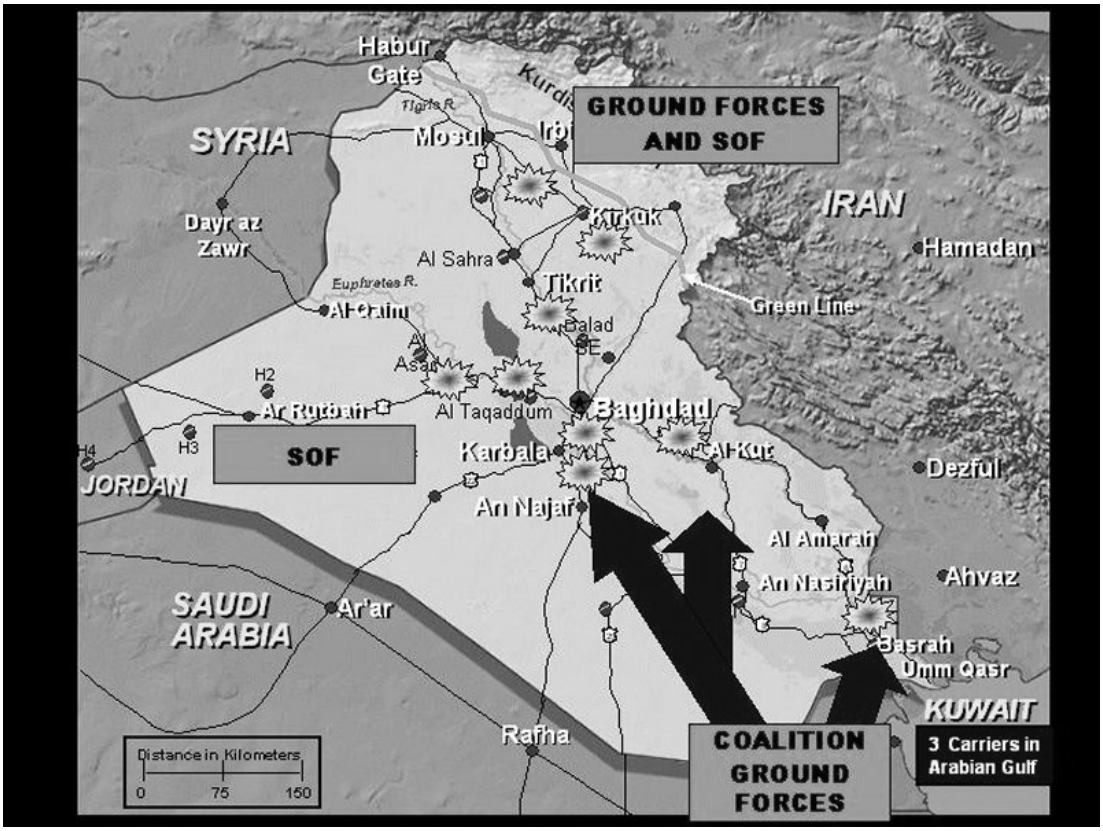
OIF melibatkan pasukan spesial (*special force*) terbanyak setelah perang Vietnam. Mayoritas pasukan yang turun saat itu adalah pasukan AS namun dibantu dengan pasukan Inggris dan Australia. Di utara Irak jumlah pasukan yang dilibatkan lebih banyak, pasukan koalisi bekerja sama dengan suku Kurdi untuk

menjatuhkan rezim Saddam Husein. Brigade *Airborne* ke 173 menandai beberapa target dan disebut sebagai koalisi udara untuk meruntuhkan rezim.

Operasi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan penyerangan terhadap beberapa target spesifik termasuk situs-situs senjata pemusnah massal dan sebagai perwakilan komando pusat. Di selatan Irak pasukan koalisi membantu pasukan konvensional untuk memberikan bantuan-bantuan pada anggota shiah (http://www.globalsecurity.org/military/ops/ iraqi_ freedom.htm, diakses 27 Juni 2009).

Gambar 4.1

Peta *Operation Iraqi Freedom*



Sumber: (http://www.globalsecurity.org/military/ops/images/030331-d-6570c-013.jpg, diakses 28 Juni 2009)

Target utama AS dalam OIF adalah situs-situs penyimpanan, penelitian dan produksi senjata pemusnah massal Irak termasuk senjata kimia. Dalam gambar 4.1 jelas tergambar beberapa situs senjata kimia Irak menjadi target utama diantara AL-Muthana dan Al-Tariq.

Setelah agresi pertama dilancarkan, AS mengklaim bahwa perangnya di Irak telah berhasil melumpuhkan rencana Irak untuk membangun kembali fasilitas senjata kimia Irak yang akan mulai dibangun kembali pada awal bulan April 2003. OIF juga berhasil melumpuhkan semua fasilitas situs-situs senjata kimia Irak.

4.3.2 Upaya-upaya Diplomasi Dalam Pilar *Non Proliferation*

Dalam pilar strateginya yang kedua AS mengemukakan dua langkah penting dalam upaya untuk mengimplementasikan strateginya. Hal utama yang menjadi dasar dari non ploriferasi adalah diplomasi aktif. AS secara aktif akan menggunakan upaya diplomatik melalui pendekatan bilateral maupun multilateral dalam mencapai tujuan dari non proliferasi. AS akan menghalangi pemasok dari negara-negara proliferan dengan negara yang berseteru dengannya untuk mengakhiri upaya negara-negara tersebut mendapatkan WMD. AS juga akan membangun koalisi untuk terus mendukung upayanya serta untuk mencari dukungan untuk terus melakukan non proliferasi dan ancaman dari program ini. Namun, AS juga akan tetap waspada jika upaya non proliferasi ini gagal maka hal yang berikutnya adalah mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan untuk mempertahankan diri terhadap kemungkinan penggunaan WMD di kemudian hari.

Upaya kedua adalah melalui rezim multilateral. Adanya rezim multilateral dan kontrol senjata yang ada memiliki peranan penting dari keseluruhan strategi ini. AS akan mendukung rezim yang ada saat ini dan bekerja untuk meningkatkan efektifitas dan tingkat kepatuhan terhadap negara-negara yang terlibat dalam rezim ini. Konsisten dengan kebijakan yang lainnya juga menjadi prioritas, AS juga akan mempromosikan perjanjian baru dan aturan yang melayani tujuan dari *non proliferasi.*

Kebijakan-kebijakan organisasi-organisasi internasional yang sepertinya menguntungkan AS tidak terjadi karena ketidak sengajaan, AS yang selalu memiliki kekuatan suara lebih, tentu saja bisa dengan mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan PBB. Hak veto yang merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki lima negara besar di dunia ini, AS bisa dengan mudah memveto keputusan-keputusan PBB.

AS juga mengupayakan untuk bisa masuk ke lembaga-lembaga internasional yang berhubungan dengan pengembangan senjata pemusnah massal, dalam senjata kimia, AS mencoba untuk bisa masuk melalui *Organisation for Prohibited Chemical Weapon* (OPCW). OPCW mulai masuk Irak sebelum dan setelah OIF dilaksanakan. Setelah pelaksaan OIF dan pergantian rezim, pemerintahan Irak terlihat lebih kooperatif untuk bergabung dan terbuka terhadap institusi internasional, tidak seperti pada masa Saddam Husein yang cenderung lebih tertutup dan lebih tidak kooperatif mengenai senjata pemusnah massal, khususnya senjata kimia. PBB dan OPCW memiliki beberapa isu penting di Irak diantaranya adalah:

1. Pemilihan bagaimana cara untuk membuang limbah. Sekertaris Jendral PBB memerintahkan Irak bagaimana cara membuang limbah senjata kimia yaitu dengan mencampurkannya dengan pasir dan beton untuk membentuk batu bata, dan bukan menjadi tanggung jawab PBB melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintahan Irak sendiri.
2. Akses untuk para observer.
3. Akses yang dibuka oleh PBB untuk akses bagi para ilmuwan OPCW. Salah satu penguji memperlihatkan kepada tim bahwa PBB telah memberikan izin.
4. Implementasi dari misi yang harus diselesaikan di Irak.

Walauapun sebenarnya *non proliferasi* untuk senjata pemusnah massal bukan merupakan sebuah fenomena baru, AS sebagai pemegang kunci keamanan regional peduli terhadap beberapa fenomena-fenomena pengembangan senjata-senjata pemusnah massal baik itu senjata nuklir, kimia, biologi maupun rudal yang disebut-sebut AS berkaitan erat dengan terorisme global. Dalam hal ini, AS mengedepankan tentang upaya pengembangan senjata pemusnah massal oleh Irak dengan semua pertinmbangan kepentingan dan kebijakan luar negeri AS. Hal yang baru adalah kombinasi dari kedua ancaman ini, yaitu senjata pemusnah massal yang digunakan untuk kepentingan terorisme. Startegi nasional baru AS yang dikeluarkan oleh pemerintahan Bush mencoba untuk memfokuskan kembali bagaimana cara berdamai dengan negara-negara proliferan dan aktor non negara yang secara essensial menggantikan pendekatan *states-centris* AS terhadap upaya non proliferasi dan untuk pertama kalinya mengenalkan dan

mengimplementasikan *counter proliferation* dan secara eksplisit memperlihatkan upaya *pre-emptive*.

Untuk upayanya dalam mensukseskan program *non proliferasi* dan memaksa Irak untuk menandatangani perjanjian-perjanjian internasional AS memiliki beberapa alat diplomasi yang berkaitan dengan rezim-rezim multilateral khususnya untuk bidang ekonomi dan keuangan. Alat-alat dominasi pemerintahan AS adalah sebagai berikut:

1. IMF (*International Monetary Fund*)
2. Bank Dunia
3. WTO (*World Trade Organization*)
4. Departemen Keuangan AS dan Bank Sentral AS
5. Militer AS (http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=print&aid=1008& cid=8&lang=, diakses 28 Juni 2009).

Selain dengan lima cara tersebut, AS juga memiliki peran besar dalam lembaga multilateral terbesar di dunia yaitu Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), AS memiliki hak veto dan merupakan anggota dewan tetap keamanan PBB. Melalui PBB, AS termasuk bisa dengan mudah untuk mempengaruhi lembaga ini demi memenuhi kepentingannya, sesuai dengan prinsip para pemikir realis, bahwa rezim multilateral merupakan salah satu cara bagi negara untuk mendistribusikan *power* demi memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya.

AS dalam melaksanakan strateginya ini lebih terfokus pada pilar pertama dan kedua untuk dapat melancarkan maksud dan tujuannya untuk melucuti senjata pemusnah massal yang ada di Irak, karena mereka beranggapan bahwa upaya-

upaya non proliferasi baru bisa dilaksanakan jika Irak telah dipimpin oleh pemimpin yang lebih kooperatif dan bersahabat dengan AS. Hal ini dikarenakan beberapa kegagalan yang dialami AS dalam melakukan upaya *non proliferasi* pada masa lalu, dan sampai saat itu AS masih percaya bahwa upaya *non proliferasi* belum dapat mengurangi ancaman dimasa yang akan datang dan pada saat seperti inilah sebuah strategi komprehensif dari *counterproliferation* dibutuhkan. Dalam konteks ini pertahanan terbaik untuk melawan proliferasi dan terorisme adalah serangan yang baik atau penyerangan terlebih dahulu sebelum diserang oleh lawan yang kemudian diikuti oleh upaya pemebendungan, operasional, rencana mitigasi dan kapabilitas/kemampuan yang mapan dalam menghadapi segala kemungkinan dan resiko yang harus diambil.

Dengan menghargai upaya untuk menyebarkan teknologi yang berhubungan dengan senjata pemusnah massal, para ilmuwan AS menyimpulkan ada empat kendala yang akan dihadapi oleh AS, yaitu:

1. Negara-negara yang memperlihatkan upaya untuk mengelak dan tidak memberikan data yang sesungguhnya, patut dicurigai sebagai negara proliferan.
2. Meningkatkan akses kepada teknologi *dual use* yang telah terbukti efektif menutupi upaya-upaya negara proliferan dalam mengembangkan senjata.
3. Ketersediaan para tenaga ahli dapat mengembangkan WMD dan program rudal.
4. Perkembangan teknologi yang pesat yang memudahkan penyebaran informasi dan teknologi.

Keempat hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap upaya AS untuk mengatasi senjata pemusnah massal melalui jalur-jalur diplomatik. Dalam keterkaitan dengan Irak, terbukti Irak telah mengelak dan menyatakan tidak ingin bergabung untuk meratifikasi CWC sejak tahun 1997.

Setelah AS masuk ke Irak pada Maret 2003, Irak kemudian baru terlihat kooperatif dan akhirnya mempelajari CWC pada awal Juni 2004 saat AS mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah Irak, namun Irak baru bisa bergabung secara aktif untuk terlibat langsung dalam OPCW saat pemerintahan baru Irak terbentuk.

Surat resmi yang ditulis M. Hosyar Zebari yang merupakan menteri luar negeri Irak mengirimkan surat resmi kepada OPCW pada Agustus 2004 yang meyatakan bahwa Irak bersedia untuk mempelajari dan meratifikasi CWC untuk kemudian mengimplementasikannya, dan dua tahun kemudia setelah melalui proses panjang akhirnya Irak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan dan mempelajari CWC. (http://wmdinsights.com/I21/I21_ ME1_IraqMovesToward.htm).

Upaya *non proliferasi* yang dirintis sejak pengimplementasian stretegi WMD pada tahun 2002 hingga 2006 yang mendorong Irak untuk mempelajari dan mengimplementasikan CWC ini akhirnya berhasil membuat Irak melakukan ratifikasi CWC pada Februari 2009.

4.3.3 Upaya-upaya Dalam Pilar WMD *Consequences Management*

Paska pelaksanaan OIF dan bergantinya rezim di Irak, AS memiliki

beberapa langkah dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah paska penyerangan Irak dan melumpuhkan semua upaya yang dilakukan Irak dalam mengembangkan senjata kimia khususnya dan senjata pemusnah massal pada umumnya.

Dengan pilar ketiga dari strategi WMD ini AS memiliki beberapa langkah. Presiden Bush memerintahkan Pentagon untuk merevisi beberapa rencana untuk Saddam Husein. Sedangkan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld percaya bahwa setelah kejatuhan Saddam, power harus diberikan kepada intern Irak. Dengan kepercayaan ini, pihak Pentagon menyusun pasukan AS sebagai pihak pembebasan akan segera meninggalkan Irak dalam beberapa bulan setelah menjatuhkan rezim. Dalam skenario ini, AS tidak akan terlibat untuk membangun kembali pemerintahan Irak setelah serangan inti berhenti beroperasi.

Masalah setelah turunnya Saddam muncul ke permukaan, dengan melihat sejarah sektarian yang ada di Irak beberapa pihak termasuk didalamnya Departemen Negara AS percaya bahwa untuk membentuk kembali pemerintahan di Irak akan menjadi hal yang tidak mudah. Mereka menyimpulkan bahwa dengan menginvasi Irak dan menggantikan rezim totalitarian Saddam akan melibatkan AS pada komitmen jangka panjang yang akan menghabiskan waktu bertahun-tahun, dan membangun kembali hampi setiap aspek kehidupan masyarakt Irak mulai dari peradilan hingga pemilihan umum.

Ketegangan yang ada antara hal-hal fundamental yang membentuk proses pra-perang hingga paska perang Irak dalam lima belas bulan memuncak pada saat invasi yang dilakukan pada Maret 2003. pihak-pihak yang terlibat baik dari dalam

pemerintahan maupun dari luar pemerintahan memperingatkan jika AS gagal mempersiapkan semua perencanaan setelah pergantian rezim terjadi di Irak akan membawa AS pada resiko yang sangat besar. Walaupun Dewan Keamanan Nasional setuju bahwa Irak harus dibebaskan dari tirani Saddam, ketidaksetujuan rencana AS paska perang masih belum terpecahkan hingga saat invasi. Hal ini mengemuka karena penaksiran berbeda dari kondisi Irak sebelum perang dan konsekuensi seperti apa yang akan terjadi jika AS menggulingkan Saddam.

4.3.3.1.Menyusun Kembali Pemerintahan Paska Perang

Pada 15 Oktober 2002 sebuah instruksi diberikan oleh dewan keamanan nasional melalui salah satu anggotanya Douglas Feith mengungkapkan dalam upaya mengusulkan struktur untuk administrasi komando pusat militer (CENTCOM) paska perang. Dalam struktur itu akan terdiri dari pembentukan markas-markas militer, yang dikenal dengan *Combined Joint Task Force-Iraq* (CTJF-I), yang dikepalai oleh jenderal berbintang tiga, dan seorang anggota sipil serta dipimpin oleh seorang sipil yang disebut sebagai koordinator Irak. Keduanya akan berada di bawah komando CENTCOM.

Instruksi ini merekomendasikan Menteri Pertahanan ditempatkan sebagai inti dari semua usaha, berdasarkan apa yang menjadi pandangan Donald Rumsfeld terhadap kegiatan politik, ekonomi dan keamanan di Irak paska perang bahwa ketiga hal tersebut lebih baik berada dibawah satu institusi bukan diatur oleh institusi yang terpisah.

CENTCOM membagi fase peran militer di Irak paska perang kedalam tiga langkah yaitu alpha, bravo dan Charlie (A-B-C). Selama fase Alpha, militer AS yang akan memimpin, kemudian saat memasuki fase Bravo, kepemimpinan militer AS akan berganti kepada kepemimpinan sipil AS dan baru pada fase Charlie kepemimpinan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat Irak.

Pendekatan A-B-C ini adalah sebuah cara bagi militer untuk mengkonsepkan apa dan kapan hal-hal tertentu akan dilakukan, memberikan gambaran kepada para perencana yang belum mengetahui apakah AS akan tetap berada di Irak atau kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada pemimpin Irak atau kepada kekuasaan transnasional untuk waktu yang panjang. Tahap-tahap telah ada untuk dijalankan dan dilaksanakan namun tidak ada ketentuan pembatasan waktu, kapan hal tersebut akan dilaksanakan.

Pada 18 Oktober 2002, Rumsfeld memerintahakn Feith untuk mendirikan kantor perencanaan paska perang Irak yang nantinya akan digunakan untuk administrasi sipil masyarakat Irak, namun kemudian Rumsfeld membatalkan rencana tersebu beberapa hari berikutnya. Kemudian Feith mengetahui bahwa perintah itu datangnya dari keputusan presiden yang mengungkapkan bahwa AS tidak seharusnya melakukan langkah-langkah yang begitu jelas dalam menyiapkan strategi paska perang dimana dunia pada saat itu lebih mendesak untuk menyelesaikan masalah Irak tanpa perang.

Keputusan ini memperlihatkan resistensi dari strategi ini, bahwa untuk membawa rencana paska perang kepada publik merupakan sebuah hal yang akan menghambat upaya diplomasi dan negosiasi yang sedang berlangsung. Pada

akhrinya semua elemen perencanaan Irak bergerak dan dilakukan secara rahasia, hanya beberapa pejabat saja yang mengetahui tentang rencana ini.

Para pejabat AS percaya bahwa jika rencana paska perang yang sudah direncakan dengan matang ini diketahui oleh pemimpin Irak, Saddam Husein maka hal ini akan menghambat upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Para pejabat pun membenarkan bahwa jika Saddam mengetahui rencana-rencana paska perang telah disiapkan AS untuk Irak, maka kemungkinan terbesarnya adalah Saddam akan menghentikan upaya diplomasi yang sedang berlangsung.

Saat rencana untuk paska perang sedang dilaksanakan dibawah pengawasan ketat dan rahasia, penempatan pasukan di perbatasan Irak terus dilaksanakan dalam kepentingan untuk meyakinkan Saddam bahwa diplomasi yang sedang beralangsung adalah diplomasi yang kredibel.

Struktur administrasi paska perang dan mekanisme transisi politik masih belum diputuskan hingga kejatuhan Saddam. Sebuah *essay* mengenai strategi di Irak yang berjudul *Iraq: Goals, Obejctive, Strategy* muncul pada akhir Oktober 2002, merefleksikan kelemahan saat pengambilan keputusan dalam isu ini. Dalam essay tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dan para pejabat terkait lebih memilih untuk mengurusi keamana internal dan eksternal, bantuan kemanusiaan dan keadaan politik, ekonomi dan kemanan Irak daripada mengatur *time table* untuk transisi pemindahan kekuasaan di Irak.

4.3.3.2 Perencanaan Untuk Masa Depan Irak

Pada akhir 2002, partisipan dalam Proyek Departemen Negara Untuk Masa Depan Irak mulai memformulasikan pandangannya untuk pemerintahan Irak

paska perang. Bergerak secara independen dari tim perencana lainnya, empat belas dari ketujuh belas tim yang ada bertemu antara Juli 2002 hingga April 2003, membawa sekitar 200 orang yang diasingkan oleh Saddam untuk kemudian bertemu dengan pemerintah dan beberapa ahli internasional.

Proyek ini mengidentifikasikan isu-isu yang akan muncul jika penyerangan secara militer terjadi, mulai dari kemungkinan dari kekacauan politik hingga masalah-masalah seperti listrik, minyak dan infrasturktur air. Dari ke empat belas kelompok kerja, kebanyakan diataranya membawa permusyawarahan kepada tahun 2003, terlalu terlambat untuk bias mempengaruhi rencana sebelum perang, terlebih lagi, beberapa laporan menunjukkan kemampuan yang berbeda. Sebagai contoh, *The Transsitional Justice Working Group* menawarkan analisa detail terhadap pengembangan politik-militer Irak, salah satu sarannya adalah mengenai bagaimana mengkonstitusikan sebuah rencana aksi yang legal didepan hukum.

Kelompok kerja lainnya seperti *Public Health and Humanitarian Needs Working Group* menawarkan sebuah generalisasi yang diambil dari beberapa langkah penyelesaian krisis internasional terdahulu. Amerika Serikat (AS) merancang tugas mereka untuk menyusun komposisi pemerintahan baru di Irak. Kriteria yang disusun AS yang sudah tersusun rapi dan menjadi acuan mereka adalah, pemerintahan Irak tidak boleh mengandung unsur Partai Baath, tidak boleh dari kelompok agamis, kelompok ekstremis tetapi berpikiran modern dan bervisi demokrasi.

Dari persiapan perencanaan dan pengambilan keputusan dari sebelum perang hingga rencana-rencana setelah perang dan mengatasi segala kemungkinan yang ada, dapat kita lihat bahwa AS telah memiliki dan telah siap menghadapi semua kemungkinan terburuknya di Irak untuk mensukseskan strategi WMD ini termasuk di dalamnya pilar strategiWMD yang ketiga yaitu manajemen konsekuensi dari WMD.

AS merancang tugas mereka untuk menyusun komposisi pemerintahan baru di Irak. Kriteria yang disusun AS yang sudah tersusun rapi dan menjadi acuan mereka adalah, pemerintahan Irak tidak boleh mengandung unsur Partai Baath, tidak boleh dari kelompok agamis, kelompok ekstremis tetapi berpikiran modern dan bervisi demokrasi.

4.4 Keberhasilan Strategi WMD Amerika Serikat di Irak

Unilateralisme pemerintahan Bush sebenarnya tidak memperlihatkan pendekatan baru atau revolusi dalam kebijakan luar negeri AS seperti yang di klaim oleh beberapa pihak. Serangan *pre-emptive* atau preventif dan pergantian rezim bukanlah merupakan elemen baru dalam kebijakan luar negeri AS.

Berawal dari pengaruh dan intervensi badan intelijen AS, *Central Inteligent Agency* (CIA) pada pemilihan umum tahun 1948 di Italia dalam menegah kemenangan partai komunis, beberapa laporan mengenai kebijakan luar negeri AS selama dan setelah Perang Dingin memperlihatkan praktek *pre-emptive* dan preventif baik secara terbuka atau tertutup. Antara tahun 1945 dan 1999, AS dengan unilateralismenya telah memperlihatkan secara terbuka upayanya untuk

menggulingkan empat puluh pemerintahan, dan setidaknya sebanyak tiga puluh kali mengintervensi dan terlibat dalam gerakan-gerakan nasional yang beraksi melawan pemerintah tiran. Kebanyakan dari intervensi-intervensi yang dilakukan AS ini menyebabkan konflik sipil yang tak dapat berhenti yang dijaga tanpa keseriusan saat hal tersebut muncul pada perang dingin sebagai satu-satunya kekuatan *superpower* di dunia.

Dari apa yang terjadi di Irak bisa difahami melalui tiga kunci pemikiran yaitu ancaman yang lebih berbahaya setelah serangan 9/11, keterbatasan institusi-institusi internasional dalam menghadapi bahaya yang paling mematikan, dan sebagai sebuah konsekuensi bagi AS dalam mempersiapkan kemandirian, *pre-emption* dan bahkan tindakan-tindakan preventif jika dibutuhkan.

Ancaman yang hadir dianggap semakin berbahaya karena AS sebagai sebuah negara besar dengan keamanan yang sangat tinggi masih tetap bisa diserang oleh para teroris, hal ini menjadi asumsi dasar AS bahwa setelah serangan terhadap WTC dan Pentagon tersebut musuh-musuh AS telah menyiapkan dan menciptakan ancaman-ancaman yang lebih berbahaya dan serius.

AS yang segera mengeluarkan strategi keamanan nasional paska 9/11 ini memperlihatkan bahwa AS akan lebih agresif dan bersifat *offensive* dalam melindungi keamanan tanah air, warga negara, teman dan sekutunya. Melalui strategi nasional ini lahirlah sebuah strategi yang terintegral dengan strategi keamanan nasional ini yaitu strategi yang dikhususkan untuk mengatasi senjata pemusnah massal yang memiliki tiga pilar utama.

Pilar pertama yaitu *counter proliferation* telah berhasil menghentikan upaya Irak dalam mengembangkan senjata kimia, OIF berhasil menghancurkan fasilitas-fasilitas penyimpanan senjata-senjata kimia Irak seperti penyimpanan, penelitian dan pengembangan senjata kimia di antaranya Al-Muthana, Al-Tariq dan Al-Abud (lihat lampiran 5 untuk gambar setelah OIF).

Tempat-tempat penyimpanan yang tersebar diseluruh Irak tidak luput dari operasi militer AS dalam OIF. Tiga tempat utama penelitian dan pengembangan telah benar-benar dihancurkan oleh serangan senjata-senjata canggih yang dimiliki oleh AS dan pasukan gabungan yang mendukung OIF ini. Dengan biaya perang yang diperkirakan oleh Mentri Pertahanan AS sekitar US$ 60 juta hingga US$ 95 juta per tahun AS diharapkan dapat berhasil di Irak dan menyelamatkan semua kepentingan AS terhadap Irak seperti kepentingan ideologi, kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi.

OIF yang dilaksanakan dengan pasukan gabungan ini telah berhasil menggagalkan upaya Irak untuk membangun kembali beberapa situs dan inrfasturktur untuk program senjata kimia Irak. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh AS untuk perang Irak tidak sedikit, namun bagi kepentingan AS hal ini dianggap merupakan sebuah hal yang memang pantas untuk dibayar untuk dapat menguatkan posisi AS di Timur Tengah melalui Irak.

Munculnya penelitian terhadap senjata pemusnah massal Irak setelah perang yang memperlihatkan kesalahan-kesalahan interpretasi atas kegiatan-kegiatan Irak terhadap industri kimia menjadikan banyak pihak percaya bahwa

alasan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak hanya merupakan sebuah legitimasi AS untuk melakukan invasi dan menduduki Irak.

Hal ini tentu saja menjadi hal yang kontroversi, namun data-data yang ada membuktikan bahwa selama Irak masih memiliki sisa-sisa program senjata kimia yang masih bisa dihidupkan kembali di masa yang akan datang menjadikan AS agresif untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa senjata kimia di Irak yang akhirnya mengantarkan AS untuk melakukan perang di Irak.

Pilar kedua yaitu *non prolifreration* baru berjalan efektif setelah Irak memiliki pemimpin baru, pemimpin yang lebih bersahabat dengan rezim internasional dan lebih pro barat dibanding rezim Saddam yang terkenal anti barat. Upaya-upaya diplomasi aktif baru dilaksanakan setelah akhirnya Irak memiliki pemerintahan baru yang dibentuk pada tahun 2005.

Irak juga akhirnya memiliki konstitusi baru yang lebih demokratis dalam pandangan AS. Hal ini mencerminkan AS mulai dapat menyebarkan ideologinya dan bisa tetap mempertahankan pengaruhnya di Irak dan Timur Tengah. Tahun 2005 merupakan awal sejarah baru bagi Irak. Irak melakukan pemilihan sampai akhirnya terpilih pemerintahan baru dibawah Perdana Menteri Nouri Al-Maliki. Irak akhirnya mulai terlibat dalam perjanjian tentang senjata kimia yang berada dibawah OPCW. Hal ini tercermin dengan ikutnya pejabat pemerintahan Irak dalam pelatihan pengimplementasian *Chemical Weapons Convention* (CWC) untuk Irak pada Juli 2005.

Keterlibatan Irak dalam ratifikasi dan pengimplementasian CWC merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh OPCW untuk memastikan bahwa

semua program senjata kimia Irak tidak akan pernah dibangkitkan kembali, dan membebaskan Irak dari semua hal yang berkaitan dengan senjata kimia yang akhirnya telah mengantarkan Irak kepada invasi yang dilakukan AS pada Maret 2003.

Pelatihan yang dilakukan ini memberikan pengetahuan kepada anggota pemerintah Irak apa saja yang harus dipersiapkan dalam memperiapkan deklarasi, mencapai tujuan dari CWC dan mengimplementasikannya secara efisien untuk menghilangkan senjata kimia dan untuk mencegah penyebarannya berdasarkan CWC. Upaya – upaya diplomasi pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Setelah melalui beberapa pelatihan barulah Irak akhirnya meratifikasi CWC pada Februari 2009.

Pilar ketiga, WMD *consequences management*. Pilar ketiga ini sebenarnya adalah pilar paling pertama yang diimplementasikan, hal ini terkait dengan perencanaan sebelum dan sesudah tindakan preventif dilaksanakan. Perencanaan yang cukup rumit sebelum perang dan sempitnya waktu untuk berdiskusi dalam merencanakan apa yang akan dilakukan di Irak sempat menjadi kendala tersendiri bagi AS dalam mengimplementasikan strategi ini walaupun pada akhirnya semua hal bisa teratasi.

Satu hal tentang lemahnya perencanaan AS di Irak adalah AS tidak menetapkan batas waktu untuk mengimplementasikan strategi dan melaksanakan rencana-rencana yang telah disusun sehingga akhirnya AS malah terperangkap dalam perang yang cukup panjang.

Tidak adanya batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengambil keputusan AS membuat beberapa tahapan dalam perencanaan menjadi tidak terkontrol dan akhirnya memaksa AS untuk tinggal lebih lama di Irak. Hal ini tentu saja menjadi salah satu konsekuensi yang harus diambil AS, biaya perang yang semakin besar di tiap tahunnya membebani anggaran militer AS.

Kenyataan sulit dalam berhubungan dengan Irak menciptakan keharusan dalam mengambil resiko. Resiko pertama adalah kenyataan bahwa berhubungan dengan Irak menciptakan resiko yang lebih besar, dengan Saddam yang siap menjual minyak dan melanjutkan upaya-upaya pengembangan senjata kimianya, lingkungan rezimnya, catatan agresi yang dilakukan Saddam dan kemampuannya dalam menciptakan sebuah ancaman.

Kedua, keterbatasan institusi internasional juga terlihat sangat jelas. PBB ataupun institusi internasional lainnya memiliki keinginan atau kemampuan untuk melakukan sebuah perjanjian dengan Irak. Dengan resolusi 1441, Dewan Keamanan PBB secara tidak langsung telah mengumumkan bahwa Irak dengan semua material dan pelanggaran-pelanggarannya telah menciptakan ancaman yang serius.

Inspeksi yang diperbaharui dibawah UNMOVIC telah menemukan bahwa Saddam tidak ingin menjadi kooperatif terhadap isi resolusi tersebut dan bahkan beroposisi untuk penggunaan kekuatan militer, hingga akhirnya PBB, AS termasuk Perancis dan Russia berasumsi bahwa Saddam telah membangkitkan kembali kuantitas WMDnya.

Upaya PBB dalam mengatasi senjata pemusnah massal Irak termasuk senjata kimia telah diupayakan agar Irak menghentikan upaya-upayanya, diantaranya dengan program PBB yaitu *Oil for Food Programe* atau program minyak untuk makanan. Namun program tersebut malah dijadikan alat lain untuk melakukan korupsi, Saddam berhasil memiliki uang tunai sejumlah US 4.4 Milyar, juga dengan tambahan US$ 5,1 Milyar dari minyak diluar program PBB tersebut. (Lieber, 2005 : 51)

Prancis dan Russia sebenarnya memiliki keuntungan dari program *oil for food* sebagai negara investor dan sumber kontrak dimana Prancis menginvestasikan dananya sebesar US$ 3.7 milyar dan US7.3 milyar berasal dari Rusia, kedua negara tidak menyetujui adanya pelanggaran terhadap program ini.

Rentannya institusi internasional untuk hadir di Irak dan membantu proses pemulihan Irak dapat dilihat dengan kehadiran PBB paska runtuhnya rezim Saddam Husein. Dalam kasus ini, PBB terlihat tidak ingin mengambil resiko besar dan konsekuensi untuk hadir di Irak, pada Agustus 2003 dimana pusat komando Baghdad diserang oleh sebuah bom bunuh diri. Ledakan ini tidak hanya membunuh 23 orang, termasuk orang terbaik di PBB yang kemungkinan bisa menjadi sekretaris jendral PBB berikutnya, Sergio Vieria de Mello, hal ini menyebabkan PBB langsung menarik mundur semua anggotanya dari Irak.

Ketiga, ada sebuah motivasi bagi AS untuk mengambil inisiatif dalam memimpin koalisi negara-negara yang mendukung penggunaan kekuatan militer untuk Irak. Tidak aneh lagi, kepemimpinan AS dalam memimpin aksi ini menuai kritik dari berbagai kalangan di dunia internasional. Penentangan terhadap

kebijakan AS telah dimulai sejak AS melakukan serangan terhadap rezim Taliban di Afganistan. Namun, AS tetap melancarkan kebijakannya dan selalu dapat mengimplementasikan apa yang telah menjadi strateginya.

Pada akhir tahun 2006, AS mengeluarkan beberapa fakta dan keadaan di Irak melalui Dewan Keamanan Nasionalnya dalam sebuah penjelasan yang singkat mengenai keadaan terakhir di Irak, diantaranya adalah:

1. Rezim Saddam Husein telah berhasil dihentikan, dan bukan lagi merupakan ancaman bagi rakyat Irak, negara-negara tetangga Irak ataupun bagi AS sendiri.
2. Irak telah memiliki pemerintahan yang terpilih dibawah konstitusi permanen.
3. Institusi demokratis telah dibentuk dan telah membentuk Irak menjadi negara dengan pemerintahan sendiri yang demokratis.
4. Angka pendapatan nasional Irak telah meningkat dari US$ 743 menjadi US$ 1.593 menurut Bank Dunia, meskipun inflasi tidak dapat dihindari dan Irak telah berada di bawah perjanjian dengan IMF. (*Highlights of the Iraq Strategy Reviews*)

AS juga tidak memungkiri adanya masalah-masalah yang muncul akibat masuknya AS ke Irak, seperti penanganan kelompok teroris Al-Qaeda yang kini menjadi ancaman yang serius setelah mereka terlibat dalam konflik sectarian Irak paska perang, kemudian keinginan pemerintah nasional Irak untuk segera mengambil alih kekuasaan di Irak dengan kemampuannya yang terbatas dan semakin luasnya konflik sektarian membuat situasi semakin rumit. Hal terakhir

yang bertambah kompleks dalam tahun 2006 adalah upaya pemindahan kekuasaan yang terkait dengan isu-isu internasional.

Selain beberapa hal diatas, AS juga memparkan tentang keadaan politik Irak yang mereka anggap telah menunjukan pendewasaan meskipun rekonsiliasi di Irak masih harus diwujudkan nantinya, karena mereka beranggapan bahwa pemimpin-pemimpin Irak belum memiliki satu visi yang sama untuk Irak.

Pasukan Keamanan Irak (*Iraqi Secutiry Forces,* ISF) yang segera di bentuk paska perang Irak telah tumbuh lebih efektif namun kerusuhan ataupun kekacauan yang harus mereka tangani juga semakin meningkat. Profesionalisme dan efektivitas telah tumbuh meskipun masih belum konsisten diseluruh bagian ISF, beberapa anggota ISF yang dikenali sebagai anggota kepolisian terbukti terlibat dalam konflik sektarian, meskipun telah melatih lebih dari 300.000 ribu orang namun secara substansial jumlah pasukan yang bertugas lebih sedikit dibandingkan dengan yang mendapatkan pelatihan. (*Highlights of the Iraq strategy reiview, National Security Council*).

Pelatihan militer ini dimaksudkan agar nanti saat AS akan meninggalkan Irak, Irak telah memiliki pasukan keamanan yang bisa mengamankan wilayah Irak dan dapat meredam semua konflik yang ada hingga Irak bisa terbebas dari rasa tidak aman serta tetap bisa mempertahankan kedaulatan negaranya.

Selain dari memperbaiki dan merencanakan semua konsekuensinya di bidang militer, AS juga menyiapkan bantuan disegala aspek kehidupan warga Irak, termasuk fasilitas-fasilitas yang sangat mendasar yang bisa mendukung

kehidupan sehari-hari rakyat Irak, diantaranya dengan membangun kembali infrasturktur, air, listrik dan sarana-sarana kesehatan, diantaranya:

1. Berhasil mengimpor 575.000 metrik ton gandum, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem distribusi.
2. Memperbaiki 2.500 sekolah, mendistribusikan buku pelajaran kepada kurang lebih 8.7 juta pelajar, melatih 33.000 tenaga pengajar.
3. Memperbaikin fasilitas kesehatan, seperti memperbaiki dan merehabilitasi 600 pusat kesehatan.
4. Memperluas dan memperbesar fasilitas penjernih air di Baghdad dan merehabilitasi sekitar 27 mesin air dan pompa pembuangan.
5. Umm Qasr, alat pengangkat kargo yang diperbaiki dalam satu tahun setelah invasi sudah bias mengangkut 140.000 ton kargo dalam satu bulan.
6. Memperbaiki 8 pembangkit listrik.
7. Membuka kembali Bank Sentral (*A Year in Iraq, US Agency for International Development*).

Dari beberapa restrukturisasi yang dilakukan AS untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Irak, dapat disimpulkan bahwa memang AS telah siap dengan semua konsekuensi atas keputusannya untuk melakukan invasi terhadap Irak. AS telah siap dengan semua dan kemungkinan terburuk untuk kembali terjebak di perang dengan jangka panjang. Berdasarkan semua perkiraan biaya dan pengambilan keputusan serta berbagai pertimbangan, AS kemungkinan besar baru akan benar-benar meninggalkan Irak pada tahun 2016 mendatang.

Hingga berakhirnya masa strategi ini yang kemudian direvisi pada tahun 2006 untuk lebih spesifik menjadi strategi militer AS untuk memerangi senjata pemusnah massal, ada beberapa pencapaian yang telah berhasil dilakukan AS di Irak yaitu:

1. Menghentikan dan menghancurkan semua fasilitas senjata kimia baik itu infrastruktur penelitian, pengembangan dan penyimpanan senjata dan bahan-bahan pembuat senjata pemusnah massal.
2. Melakukan upaya diplomasi melalui OPCW agar Irak meratifikasi CWC. Meskipun keberhasilan atas upaya ini baru tercapai setelah akhirnya Irak meratifikasi CWC pada Februari 2009, hal ini merupakan proses panjang yang dirintis AS dibawah strategi WMD ini.
3. Melakukan restukturisasi semua aspek kehidupan masyarakat Irak, mulai dari pemerintahan baru yang dibentuk pada tahun 2005, pembentukan dan pelatihan militer terhadap kurang lebih 300.000 penduduk Irak, melakukan perjanjian AS-Irak untuk kerjasama keamanan dan perdagangan hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Irak.

Dari beberapa pencapaian yang diraih oleh AS dapat kita nilai bahwa AS meskipun kurang dalam perencanaan namun tetap mereka bisa melakukan eksekusi dengan cukup baik kendati harus menambah resiko dan konsekuensi yang harus mereka ambil.

Berakhirnya masa strategi pada tahun 2006 telah membuat beberapa perubahan besar di Irak. Upaya pengembangan senjata kimia Irak sudah terhenti sejak OIF dan pada tahun 2005 semua program senjata kimia Irak dinyatakan telah berhenti dan semua fasilitas senjata kimia Irak telah hancur.

Semua tempat penyimpanan dan tempat penelitian dan pengembangan telah mengalami inspeksi oleh berbagai pihak dan dinyatakan bahwa senjata kimia Irak memang sudah dihancurkan, yang tertinggal hanya tempat penyimpanan yang mengalami kerusakan parah dan sudah tidak mungkin untuk dikembangkan atau dibangun kembali. Situs-situs yang dulunya digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan senjata kimia telah berhasil dilumpuhkan dan dihancurkan oleh pasukan koalisi yang dipimpin AS melalui OIF.

Irak mulai terlibat aktif dalam CWC yang kini berada di bawah OPCW, hal ini merupakan tanda positif bahwa Irak tidak akan pernah lagi melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan senjata kimia, hingga akhirnya 3 tahun setelah masa strategi ini berakhir akhirnya Irak meratifikasi CWC pada Februari 2009.

Pemerintahan baru yang terpilih melalui pemilu pada akhir tahun 2005 menandakan sebuah keberhasilan AS dalam mengimpelemtasikan strategi WMD ini. Pemilu yang digelar akhir tahun 2005 dimenangkan oleh kelompok Shiah namun mereka gagal memenangkan 2/3 jumlah kursi untuk memenangkan pemilu hingga akhirnya harus tetap membentuk koalisi.

Upaya rekonstruksi fasilitas masyarakat Irak masih berada dibawah level sebelum AS melakukan invasi, namun hal tersebut merupakan hal yang wajar

karena dalam melakukan rekonstruksi pasti dibutuhkan sebuah proses yang panjang dan waktu yang tidak singkat untuk dapat mengembalikan Irak kepada sebuah keadaan yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelum perang.